



## MENOLAK SARKAS: MENGENAL SECARIK DAMPAK POSITIF DARI KEBIJAKAN PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA SEBAGAI SUMBER BELAJAR SISWA

**Epriwina Gini Nurrahma**

*nurrahmaepriwina@students.ac.id*

Universitas Negeri Semarang

### Informasi Artikel

**Kata Kunci :**

Dampak Positif, Kebijakan, Masa Pendudukan Jepang, Siswa, Sumber Belajar.

**Keywords:**

*Positive impact, Policy, Japanese occupation period, Students, Learning resources.*



*This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*

*Copyright ©2023 by Author.  
Published by Universitas Jambi*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian pada penulisan ini adalah untuk mengetahui dampak positif (sisi positif) dari kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia dengan sasaran yaitu peserta didik (siswa) untuk dapat digunakan sebagai sumber belajar siswa. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode historis dengan melalui langkah-langkah yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan tahap akhir yaitu historiografi. Pada penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Teknik analisis data berupa teknik analisis data historis. Dimana kegiatan analisis menggunakan kritik, interpretasi, dan menarik kesimpulan serta menafsirkannya dengan menggunakan tahap historiografi. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah Sisi positif atau keuntungan yang dapat dipetik atau diperoleh bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang adalah terdapat pada bidang politik, bidang militer, bidang ekonomi, bidang sosial-budaya serta pendidikan.

### ABSTRACT

*The purpose of research in this writing is to determine the positive impact (positive side) of the Japanese occupation policy in Indonesia with the target of students (students) to be used as a source of student learning. The research method in this writing uses historical methods through steps, namely, heuristics, criticism, interpretation, and the final stage, namely historiography. This study also uses data collection techniques, namely data analysis techniques in the form of historical data analysis techniques. Where analysis activities use criticism, interpretation, and drawing conclusions and interpreting them using the historiographic stage. The results of the research obtained by researchers are The positive side or benefits that can be obtained or obtained by the Indonesian people during the Japanese occupation are found in the political, military, economic, socio-cultural and educational fields.*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alamnya dan sumber daya yang sangat melimpah. Indonesia terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Dengan adanya kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia membuat banyak bangsa atau negara asing yang tertarik dan berdatangan dengan tujuan ekspansi (menguasai). Bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam, salah satu komoditi yang diburu bangsa barat (Eropa) secara umum yaitu rempah-rempah. Melihat harga rempah-rempah di Indonesia dijual dengan harga murah maka semakin berduyun-duyun bangsa-bangsa di Eropa untuk mencari rempah-rempah di Indonesia (Aman, 2014:10). Bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Penjajahan Jepang dapat dikatakan berbeda dengan bangsa-bangsa barat dalam hal menjajah. Penjajahan Jepang bukan seperti halnya “kolonialisme”

melainkan “pendudukan” karena Indonesia masih menjadi wilayah pendudukan, setelah berhasil direbut dari pemerintah Belanda oleh pemerintah Jepang ketika dalam masa perang.

Keterlibatan Jepang pada Perang Dunia II berdasarkan ambisi Jepang dalam membangun dan mendirikan wilayah kekuasaan di Asia (Jepang ingin menguasai seluruh wilayah Asia serta ambisi untuk menaklukkan Uni Eropa) yang merupakan sebab dari kepuasan Jepang pada Perang Dunia I akan kemenangan atas Rusia. Hal tersebut yang membuat Jepang semakin berapi-api dan agresif untuk membebaskan bangsa-bangsa Asia dari cengkaman bangsa Barat. Nafsu ekspansi yang dimiliki Jepang berasal dari ajaran Hakko Ichi-u (ajaran delapan benang dalam satu panel atau atap). Singkatnya, Jepang menganggap dirinya sebagai saudara tua bagi seluruh dunia dengan Jepang yang menjadi pemimpinya. Pada tanggal 9 Desember 1941 merupakan langkah awal Jepang, dimana Jepang melakukan serangan di Pearl Harbour (tepatnya di Hawaii yang merupakan Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat). Peristiwa tersebut membuat gubernur jenderal Tjarda Van Skarckenborgh Stachower menyatakan perang terhadap Jepang melalui siaran radio. Bagi Tjarda Van Skarckenborgh Stachower, penyerangan tersebut merupakan sebuah kode Jepang untuk melakukan atau bersedia berperang.

Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang berhasil menguasai wilayah-wilayah Indonesia bagian luar Pulau Jawa. Kemudian Jepang melanjutkan misi penguasaan dan pemusatan serangan ke Pulau Jawa tanggal 28 Februari 1942 dengan mendarat di tiga tempat sekaligus yaitu Banten, Indramayu (Jawa Barat), dan Kragan (Rembang).

Selama Jepang berkuasa di Indonesia, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang di Indonesia. Untuk dapat memperlancar kebijakan Jepang di wilayah pendudukan Jepang di Jawa saat itu, militer Jepang memberikan sikap afektif yang besar terhadap bagaimana mendoktrinasi masyarakat, melunakkan hati masyarakat, dan bagaimana menarik simpati dan perhatian dari masyarakat (Kurasawa, 2015:247). Dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan Jepang tidak sedikit yang memunculkan penderitaan bagi masyarakat pribumi itu sendiri. Itu menjadi hal yang wajar dalam penjajahan, dimana terdapat pihak yang diuntungkan atau berkuasa (disini Jepang) dan terdapat pihak yang dirugikan (disini Masyarakat Indonesia).

Lantas, bagaimana halnya jika kebijakan-kebijakan yang diterapkan Jepang malah membuat untung bagi masyarakat Indonesia dikemudian hari? Tentu kebijakan-kebijakan tersebut justru berbuah atau berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Memang, tidak langsung saat itu juga menguntungkan, namun dapat menguntungkan di kemudian hari untuk masyarakat Indonesia. Dalam pembelajaran sejarah, mata pelajaran sejarah memiliki sebuah makna yang strategis dalam pembentukan karakter dan peradaban yang bermartabat serta membentuk generasi Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme (kebangsaan dan cinta tanah air) (Aman, 2014: 118).

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah perlu adanya penanaman rasa nasionalisme dalam membangun karakter bangsa, terutama bangsa Indonesia. Materi

dalam pembelajaran sejarah didalamnya terkandung nilai-nilai kepahlawanan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia terhadap kesewenangan pemerintah Jepang. Karena pada dasarnya, materi sejarah mengandung nilai-nilai keteladanan, semangat pantang meyerah, kepeloporan, patriotisme, kepahlawanan, dan nilai-nilai pantang menyerah dalam pembentukan karakter peserta didik sebagai proses penciptaan peradaban bangsa Indonesia (Aman, 2014: 118).

Dengan menanamkan sikap nasionalisme secara tidak langsung dapat membentuk sikap anti penjajahan terhadap siswa. Dalam materi penjajahan pada pembelajaran sejarah, termasuk materi “Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang”, dalam buku teks sejarah berisi kejahatan dan kekejaman Jepang terhadap Indonesia untuk membentuk sikap anti penjajahan terhadap siswa. Pada era penjajahan, segala bentuk kebijakan penjajah dianggap kejam dan merugikan masyarakat pribumi (Indonesia) baik pada era penjajahan Belanda maupun pendudukan Jepang di Indonesia dalam pembentukan sikap anti penjajahan pada siswa (Berdasarkan Buku Teks Sejarah Kurikulum 1994) (Badrika, 1997). Tentu, hal tersebut dapat membangun sikap nasionalisme serta sikap keprihatinan siswa terhadap sejarah bangsa nya sendiri dengan melihat bagaimana penderitaan masyarakat Indonesia ketika penjajahan itu berlangsung. Namun, tak banyak siswa yang mengetahui apa saja dampak atau sisi positif dari kebijakan pada masa pendudukan Jepang yang dapat dipetik masyarakat Indonesia sehingga dapat bermanfaat bagi masa depan Indonesia.

Untuk itu, melalui tulisan ini penulis ingin menunjukkan dampak-dampak positif dari kebijakan buatan Jepang yang dapat bermanfaat dan menguntungkan Indonesia sebagai sumber belajar siswa. Tujuan penulisan ini adalah untuk menunjukkan masa pendudukan Jepang, tidak hanya menyisahkan hal-hal yang berbau penderitaan saja, melainkan masih terdapat sedikit sisi atau dampak positif yang cukup berpengaruh bagi masa depan Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu cara kerja yang dilakukan oleh peneliti untuk membantu dalam penyelesaian kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode historis. Metode historis yaitu proses menguji dan menagalisis secara kritis terkait sumber-sumber sejarah, misalnya rekaman dan peninggalan masa lampau (Louis Gottscalk, 1986:32).

Terdapat langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian historis, diantaranya sebagai berikut.

1. Huristik, pada langkah kegiatan ini peneliti mencoba untuk mencari sumber penelitian dan mengumpulkan data yang tentunya berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Sumber-sumber data yang sudah diperoleh digunakan untuk menjelaskan konsep, materi, dan metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber-sumber data, yaitu
  - a. Jurnal:

- b. Buku-buku sejarah:
  - c. Buku-buku pendukung:
3. Kritik, setelah semua data berhasil terkumpulkan. Langkah atau tahapan selanjutnya adalah peneliti melakukan kritik pada sumber yang telah ditemukan (baik menggunakan kritik eksternal maupun kritik internal)
  4. Interpretasi, pada tahap ini dimana setelah peneliti melakukan kritik pada sumber atau data yang diperoleh selanjutnya melakukan penafsiran terhadap data atau sumber yang telah valid yang kemudian dibentuk generalisasi sejarah. Dimana peneliti mencoba menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan sesuai dengan informasi dari data atau sumber yang diperoleh tentang dampak atau sisi positif kebijakan yang ditetapkan oleh Jepang di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai sumber belajar siswa.
  5. Historiografi, pada tahapan yang terakhir ini peneliti menuliskan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk kalimat (tulisan) yang tersusun dengan sistematis terkait dampak atau sisi positif kebijakan yang ditetapkan oleh Jepang di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai sumber belajar siswa. Pada penulisan ini dilakukan peneliti secara sistematis dan berurutan sesuai dengan poin dari isi yang ditemukan dari hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam menggali dan mengumpulkan informasi atau data dari permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa Teknik Kepustakaan. Studi pustaka yaitu sebuah cara pengumpulan informasi atau data dengan alat bantu berupa macam-macam materi yang terdapat pada perpustakaan, misalnya koran, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen (file) dan jenis materi lainnya yang sesuai atau relevan dengan inti penelitian (Koentjaraningrat, 1983:420)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Awal Pendudukan Jepang***

Kedatangan Jepang ke Indonesia membuat Indonesia masuk ke dalam pembabakan sejarah baru di bawah naungan kekuasaan Jepang. Tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia terutama Jawa ialah untuk “memerdekakan” penduduk bumiputra/pribumi dari penjajahan Belanda dan pengaruh kebarat-baratan. Ketika melakukan penyerbuan ke Jawa mereka (pihak Jepang) telah melakukan propaganda secara optimal (intensif) melalui radio gelombang pendek yang mampu membangkitkan rasa kebangsaan para pribumi (masyarakat Indonesia) (Kurasawa, 2015: XIVIII). Respons positif yang ditunjukkan rakyat pribumi ketika Jepang datang ke Indonesia dapat disaksikan pada saat penerimaan anggota militer (tentara) Jepang di beberapa wilayah Indonesia.

Respons positif yang ditunjukkan masyarakat Indonesia kala itu adalah sebuah perwujudan keyakinan mereka terhadap sebuah ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa suatu hari Pulau Jawa akan kedatangan bangsa kulit kuning yang dapat menyelamatkan Indonesia dari penjajahan kulit putih (Belanda), namun kekuasaan orang

kulit kuning hanyalah seumur jagung dan mereka akan menjadi terakhir bangsa yang menjajah Indonesia dan setelahnya Indonesia akan memperoleh kemerdekaan. Ramalan yang sudah diyakini oleh masyarakat Pulau Jawa, tidak disia-siakan oleh bangsa Jepang sehingga dimanfaatkannya sebaik mungkin dalam berkuasa. Kedatangan Jepang di Indonesia pada dasarnya terdapat dua misi prioritas, yaitu menghapus pengaruh barat pada masyarakat dan memobilisasi masyarakat Indonesia untuk kepentingan kemenangan tentara Jepang atas perang (Fadli & Kumalasari, 2019). Maka dalam pandangan masyarakat Jawa menganggap kedatangan Jepang menjadi suatu hal yang wajar.

Secara kronologis, serangan yang diluncurkan Jepang di Indonesia, daerah yang diduduki pertama kali oleh Jepang adalah Tarakan (Kalimantan Timur) pada tanggal 10 Januari 1942, menyusul wilayah Minahasa, Balikpapan, Ambon, Sulawesi. Pada bulan Februari wilayah taklukkan Jepang meluas meliputi wilayah Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Bali, dan Palembang. Kemudian Jepang mulai memasuki wilayah Pulau Jawa dan melakukan penyerangan di Banten, Indramayu, Kragan (Rembang). Jepang menyerang semua pusat kekuasaan Belanda di Batavia (5 Maret 1942), kemudian ke Bandung tanggal 8 Maret 1942 hingga akhir dari kekuasaan Belanda di Jawa dimana Belanda menyerah kalah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Bandung. Sesudah pendudukan Jepang mulai berkuasa di Indonesia (terutama pendudukan militer Jepang), terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Pertama, Jepang mulai memusnahkan semua pengaruh Barat pada masyarakat Indonesia. Kedua, segala kekuatan dikerahkan untuk mendukung tercapainya kemenangan Jepang atas Perang Asia Timur Raya. Oleh sebab itu, semua kebijakan yang ditetapkan Jepang di Indonesia hanya dikerahkan untuk mencapai tujuan Jepang atas Perang. Pendudukan Militer Jepang yang berlangsung selama tiga tahun (1942-1945) dianggap sewenang-wenang dalam menerapkan kebijakan kepada masyarakat serta menysikan kebijakan yang menuai kontra sehingga sering terjadi kontroversi di masyarakat (Pradita & Sunarti, 2022). Pada awalnya, pemerintah Jepang memiliki citra baik di mata masyarakat Indonesia, namun semakin lama semakin terlihat satu persatu kelicikannya.

### ***Kebijakan-kebijakan Jepang Selama Berkuasa di Indonesia.***

#### **a. Bidang Politik**

Kebijakan pertama setelah Jepang menduduki Indonesia, dimana Jepang melarang segala bentuk kegiatan berkumpul (berserikat), dengan melarang aktivitas tersebut maka Jepang membubarkan organisasi politik pergerakan nasional dan partai-partai pada masa Hindia Belanda (kecuali MIAI). Namun, MIAI dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi. Respon para tokoh pergerakan nasional Indonesia kala itu mengambil sikap kooperatif (kerja sama) terhadap kebijakan Jepang. Kemudian, Jepang membuat sebuah wadah organisasi-organisasi yang langsung dibawah pengawasan mata Jepang. Dengan respon atau sikap dari para tokoh tersebut, banyak tokoh-tokoh pergerakan nasional yang bergabung dalam badan-badan yang dibentuk oleh Jepang. Organisasi pertama bentukan Jepang adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A merupakan sebuah nama yang melambangkan Jepang adalah Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan Cahaya Asia. Pada bulan April 1942, Gerakan 3A ini mulai

diberlakukan pertama kali di Jawa (Ricklef, 2008:302). Dalam menjalankan gerakan ini, Jepang berusaha mengajak kerjasama dengan para tokoh Indonesia dengan membebaskan tokoh-tokoh besar Indonesia yang ditahan (seperti Ir. Soekarno, Drs.Moh. Hatta, Sutan Syahrir, dan lain-lain). Dimana pada awal gerakan ini diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia hanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia namun dengan menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa pemerintah Jepang sebagai saudara tua seolah berjanji akan memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia, namun gerakan ini gagal dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian pada tahun 1943, gerakan ini diganti dengan gerakan Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Putera dibentuk pada tahun 1943 dengan pimpinan yang disebut dengan empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs.Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mansyur. Namun, pada realita nya organisasi yang merupakan bentukan Jepang malah menjadi 'senjata makan tuan' bagi Jepang. Karena anggota-anggota Putera merupakan tenaga-tenaga baru yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi padahal pendudukan Jepang kala itu sudah menunjukkan semangat imperialisme sehingga secara tak langsung nampak jelas semangat anti-Jepang yang tertanam dihati anggota Putera. Dengan menyadari hal tersebut, Jepang mulai resah dan takut dengan anggota-anggota Putera yang telah memiliki sikap nasionalisme dapat membahayakan posisi Jepang, sehingga Putera dibubarkan dan digantikan dengan PETA (Pembela Tanah Air). Terdapat organisasi bentukan Jepang yaitu Perhimpunan Kebaktian Rakyat (Jawa Hokokai) yang merupakan organisasi pengganti PETA. Jawa Hokokai dibentuk dengan tujuan Pemimpin organisasi ini adalah untuk penghimpunan rakyat, baik secara lahir dan batin sesuai dengan semangat kebaktian yang berupa memperbanyak persaudaraan, rela mengorbankan diri, dan melakukan hal disertai dengan bukti. Organisasi ini dibawah komando militer Jepang, mengingat organisasi-organisasi sebelumnya yang pemimpinnya adalah pemuda Indonesia sendiri dianggap menguntungkan bangsa Indonesia yang membuat kepercayaan Jepang terhadap para pemimpin bangsa Indonesia perlahan mulai luntur. Terlebih jepang tidak ingin mengambil resiko karena Jepang disisi lain harus fokus pada situasi peperangan Asia Timur Raya yang saat itu semakin menyudutkan posisi Jepang, dimana kala itu Jepang banyak mengalami kekalahan akibat serangan balik yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Jepang juga menerapkan kebijakan dalam pembentukan Pemerintahan Sipil. Pemerintahan sipil pada masa Belanda status kepegawaiannya masih diakui oleh pemerintah Jepang dengan jaminan kesetiaan mereka terhadap Jepang. Pada kebijakan ini, Jepang mengubah struktur pemerintahan dari sipil ke militer dan terjadi pergerakan sosial ke atas dalam birokrasi. Struktur yang diterapkan dalam pemerintahan sipil berupa Pualu Jawa dan Madura (kecuali wilayah Surakarta dan Yogyakarta) dibagi menjadi enam daerah pemerintahan, diantaranya: (1) Syu (Karesidenan) dipimpin oleh seorang syuco, (2) Syi (Kotapraja) dipimpin oleh seorang Syico, (3) Ken (Kabupaten) dipimpin oleh seorang Kenco, (4) Gun (Distrik) dipimpin oleh Gunco, (5) Son (kecamatan) dipimpin oleh Sonco, (6) Ku (kelurahan atau desa) dipimpin le Kuco.

## **b. Bidang Militer**

Dalam situasi perang Jepang saat itu, kebutuhan kemiliteran menjadi sangatlah diperlukan. Kemudian muncul rencana Jepang yang menyadari bahwa tenaga pribumi dapat dimanfaatkan oleh Jepang untuk menambah pasukan perang Jepang pada Perang Dunia II dengan memberikan pendidikan militer dengan harapan akan membantu untuk dijadikan sebagai ujung tombak pertahanan Jepang pada perang (Pasukan rakyat Indonesia diposisikan digaris terdepan).

Diawali dengan adanya badan semi militer yaitu Seinendan yang merupakan sebuah badan yang berdiri pada tanggal 29 April 1943. Untuk bergabung dalam badan ini terdapat kualifikasi tertentu seperti, pemuda yang berumur kisaran 18 hingga 24 tahun. Tujuan didirikan badan ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pendidikan dalam hal menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan segenap jiwa dan raga secara penuh. Namun, Seinendan ini memiliki maksud tertentu yaitu agar dapat memiliki pasukan cadangan yang kemudian akan dikirim untuk perang membantu Jepang di Perang Asia Timur Raya. Kemudian terdapat pula badan semi militer selain Seinendan, yaitu Keibodan. Seinendan dan Keibodan didirikan secara bersamaan. Namun beda halnya dengan Seinendan, Keibodan dibentuk dengan tujuan agar pemerintah Jepang tidak terkena pengaruh dari kaum nasionalis. Untuk itu, badan ini (Keibodan) ditempatkan dengan di bawah pengawasan polisi.

Setelah pembentukan badan semi militer, kemudian terdapat badan bentukan Jepang yang lebih ditingkatkan statusnya menjadi badan yang bergerak di bidang Militer. Heiho adalah sekumpulan prajurit Indonesia kisaran berumur 18-25 tahun yang secara langsung ditempatkan dalam militer Jepang, baik di Angkatan Darat (AD) maupun Angkatan Laut (AL). Para anggota dilatih militer secara 'jor-joran' atau bersungguh-sungguh dan ketika lulus akan dikirim ke markas kesatuan militer milik Jepang kemudian dikerahkan untuk mengikuti perang.

Selain Heiho terdapat badan yang dibentuk oleh Jepang, yaitu PETA dengan statusnya sebagai sebuah organisasi yang memiliki anggota yang terdiri dari pemuda-pemuda pribumi (pemuda Indonesia) yang diberikan pendidikan militer sesuai dengan sistem latihan militer (kemiliteran Jepang). Namun pemuda-pemuda yang mengikuti PETA merupakan pemuda yang memiliki sikap cinta tanah air (berjiwa nasionalis). Terlebih pemimpin PETA merupakan pemuda Indonesia sendiri, yaitu A.H. Nasution dan Sudirman. Seiring perkembangannya, PETA semakin menjadi organisasi yang terlalu nasionalis, kemudian organisasi PETA dianggap Jepang dapat membahayakan Jepang dan dibubarkannya PETA tahun 1994.

## **c. Bidang Sosial-Ekonomi**

Ketika masa pendudukan Jepang atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan bangsa lain dimana kedatangan Jepang ke Indonesia salah satunya adalah karena masalah ekonomi dengan mencari wilayah-wilayah yang menghasilkan bahan baku dan bahan mentah untuk pemenuhan kebutuhan industri sehingga sepenuhnya aktivitas atau kegiatan

perekonomian bangsa Indonesia diambil alih tangan oleh Jepang. Jepang menerapkan dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi autarki dan ekonomi perang. Dimana kebijakan dalam sistem autarki bertugas dalam pemenuhan kebutuhan pribadi (kebutuhan Jepang) dan menjaga pertahanan wilayah dibawah kekuasaan Jepang untuk dapat memproduksi atau menghasilkan bahan-bahan untuk kebutuhan perang Jepang saat itu. Sedangkan ekonomi perang adalah sistem yang dilakukan oleh Jepang agar pasukan perang Jepang memiliki pasokan logistik yang terpenuhi selama perang melawan Sekutu. Dimulai dengan Jepang memperbaiki infrastruktur yang dapat memperlancar kegiatan “eksploitasi ekonomi” berupa perbaikan pada jembatan, alat komunikasi milik Belanda, dan alat transportasi. Bukan hanya itu, Jepang juga melakukan pemaksaan hak milik atas semua perusahaan, kebun, dan bank yang merupakan kekayaan Belanda yang masih terdapat di wilayah Indonesia.

Jepang melakukan aktivitas eksploitasi baik SDA (sumber daya alam) maupun SDM (sumber daya manusia), seperti: (1) mewajibkan para petani dan petani hewan ternak ketika panen dapat menyerahkan seluruh hasil panen (berupa padi, beras, daging hasil ternak) kepada pemerintah Jepang untuk kebutuhan pangan para pasukan tentara perang Jepang, (2) penebangan secara besar-besaran pohon jati untuk kebutuhan pembuatan bahan dasar senjata api, (3) pembabatan habis-habisan kebun-kebun atau lahan-lahan yang ditanami tanaman yang dianggap Jepang tidak penting dan diganti dengan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan logistik perang Jepang (seperti tanaman jarak dan kapas untuk bahan pelumas senjata api).

Untuk menunjang keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian, Jepang menerapkan sistem *Romusha*. *Romusha* dibentuk dilatarbelakangi oleh Jepang yang membutuhkan banyak tenaga kerja baik dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur. pengerahan tenaga kerja dimulai dengan secara sukarela, namun karena terus-menerus mengalami desakan Perang Pasifik maka semakin lama pengerahan tenaga kerja ini bersifat memaksa dan tenaga kerja *romusha* diserahkan pada *Romukyokai* (panitia *romusha*) yang dibagi setiap desa terdapat panitia *romusha* (Hendri F. Husaini dan Apid, 2008: 39). Terlebih melihat kondisi para tenaga kerja *romusha* yang sangat memprihatinkan, dimana kelaparan, kesehatan yang tidak diperhatikan, dan penderitaan yang berkepanjangan membuat para pekerja *romusha* yang gugur. Kebijakan *Romusha* yang wadah yang menampung budak untuk Jepang, serta penghasilan petani dirampas (eksploitasi) dengan menerapkan aturan yang tidak masuk akal (Istifarah, 2014).

#### **d. Bidang Budaya dan Pendidikan**

Terdapat kebijakan Jepang dibidang kebudayaan, yaitu dengan membentuk pusat kebudayaan yang memiliki nama Jepang “*Keimin Bunka Shidosho*”. Pusat kebudayaan memiliki fungsi sebagai media atau perantara yang digunakan Jepang untuk dapat menyebarkan kebudayaan sekaligus pengaruh Jepang terhadap Indonesia. Bentuk usaha Jepang dalam menarik simpati rakyat Indonesia adalah dengan penghapusan juga

pelarangan bahasa Belanda baik dalam pergaulan sehari-hari maupun di tempat umum (termasuk papan nama toko atau lainnya) dan semua itu diganti dengan penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Hal ini Jepang menunjukkan bahwa mereka datang ke Indonesia benar-benar ingin melenyapkan penjajahan dari bangsa-bangsa barat, budaya, dan pengaruh barat di Asia (walaupun dibalik semua itu terdapat maksud terselubung). Dengan penerapan pemakaian bahasa Indonesia membuat bahasa Indonesia berkembang dan digunakan sebagai bahasa sehari-hari (bahasa kedua setelah bahasa Jepang). Namun, terdapat kebudayaan Jepang yang sangat ditentang oleh bangsa Indonesia yaitu harus meghadap ke Timur dan membungkukkan badan sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari. Bagi Indonesia hal tersebut kurang pantas diterapkan dalam kebudayaan Indonesia yang mayoritas masyarakat memeluk agama Islam.

Sistem pendidikan juga sudah diterapkan pada masa pemerintahan Jepang, dimana Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia dengan memberikan pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibangun Jepang. Dalam sekolah, siswa-siswa pribumi diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran, juga berlaku untuk penamaan sekola (instansi) dengan bahasa Indonesia.

#### ***Manfaat dari Kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia sebagai Sumber Belajar Siswa.***

Penjajahan adalah sistem penguasaan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain dengan menguasai rakyat dan sumber daya negara yang dikuasai namun masih terdapat hubungan dengan negara induk (asal). Segala bentuk penjajahan dianggap memiliki sisi gelap atau pandangan negatif bagi negara yang dijajah terhadap bangsa yang menjajah. Karena pada penerapannya, penjajahan hanya akan memberikan dampak buruk dan kerugian terhadap pihak yang dirugikan (bangsa terjajah), sedangkan menurut bangsa yang menjajah hal tersebut bukanlah bentuk dari penjajahan melainkan masa kejayaan (*Golden Age*) bagi mereka (bangsa yang menjajah).

Namun, bagaimana jika suatu penjajahan memberikan sisi positif atau dampak yang menguntungkan dari bangsa yang menjajah terhadap bangsa terjajah. Seperti ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia yang banyak sekali penderitaan yang diciptakan. Penderitaan masa pendudukan Jepang terasa sudah melekat dalam memori kolektif rakyat Indonesia. Penjajahan Jepang dimata masyarakat Indonesia identik dengan suatu hal yang menyakitkan (hal negatif) sama halnya dengan masa Kolonial Belanda di Indonesia. Namun, dapat dikatakan bahwa penderitaan rakyat di masa pendudukan Jepang lebih terasa kejam dibanding Masa Kolonial yang masa berkuasa melebihi Jepang yang hanya seumur jagung. Dengan melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan Jepang, kemudian ditanamkan sikap anti-penjajahan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama penanaman sikap nasionalisme dan anti-penjajahan pada peserta didik (siswa). Doktrinasi anti-penjajahan terhadap siswa bertujuan agar siswa mengetahui peristiwa kelam bangsa Indonesia ketika masa penjajahan Jepang sehingga tumbuhlah kesadaran sejarah dengan terciptanya nilai-nilai nasionalisme dalam diri siswa. Namun, banyak pendidik atau guru sejarah yang memberikan pemahaman sejarah penjajahan terhaap siswa bahwa

penajajahan hanyalah berisi hal-hal yang berbau negatif, padahal disisi lain sebagai guru sejarah perlu mengenalkan hikmah atau sisi positif dari penjajahan Jepang yang dapat diambil atau dipetik oleh masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya sebuah peristiwa tentu akan meninggalkan hikmahnya.

**a. Manfaat Kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia di bidang politik.**

Jepang melihat respon bangsa Indonesia atas kedatangan mereka membuat kepercayaan diri Jepang semakin menggebu-gebu untuk menanamkan pengaruhnya. Seperti ketika kebijakan awal Jepang berkuasa di Indonesia adalah dengan menghapuskan organisasi dan badan bentukan Belanda dan kemudian diganti dengan organisasi bentukan Jepang. Dengan adanya organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang melibatkan rakyat Indonesia di dalamnya seperti Gerakan 3A, Putera, dan Jawa Hokokai secara tidak langsung memberikan pengetahuan baru terhadap rakyat Indonesia tentang sistem birokrasi. Hadirnya organisasi bentukan Jepang pada awalnya dibentuk untuk kebutuhan dan kepentingan Jepang namun di sisi lain juga berdampak pada rakyat Indonesia hingga sekarang, dimana masa kini banyak sekali partai-partai dan organisasi yang tumbuh di pemerintahan. Dan terdapat organisasi masa Jepang yang masih berkembang hingga masa kini yaitu salah satunya organisasi Muhammadiyah dan NU.

Hikmah atau keuntungan lain yang dapat dipetik oleh bangsa Indonesia di bidang politik adalah ada pada struktur pembagian enam bidang pemerintahan oleh Jepang yang bertujuan mempermudah urusan administrasi dan lain-lain. Struktur pembagian tingkat pemerintahan masih terdapat hingga saat ini, hanya berbeda dalam hal penyebutan nama namun tetap pada struktur yang sama.

**b. Manfaat Kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia di bidang militer.**

Pemerintah militer Jepang kala itu memerlukan banyak dukungan untuk mendukung perang Jepang melawan Sekutu. Untuk itu, Jepang mulai merencanakan untuk mengerahkan pemuda Indonesia berkecimpung dalam dunia kemiliteran dengan membentuk badan-badan kesatuan pertahanan seperti PETA (Pembela Tanah Air) dan Heiho sebagai wadah untuk penggemblengan para pemuda Indonesia dibidang militer untuk membentuk pemuda-pemuda yang terdidik serta terlatih dibidang kemiliteran yang nantinya akan dibentuk pasukan-pasukan cadangan dalam membantu perang Jepang melawan Sekutu. Hal ini jelas tampak bahwa pemuda-pemuda Indonesia sudah memiliki bekal militer, walaupun saat itu hanya untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang saja. Namun disisi lain, bekal kemiliteran yang diasah oleh para pemuda dapat membentuk suatu pertahanan untuk bangsa Indonesia ini sendiri. Seperti tentara yang ada pada masa kini, adalah berkat dari separuh didikan militer yang didapat pada masa Jepang di Indonesia. Keuntungan yang jelas tampak adalah ketika pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat), dimana Ir. Soekarno mengerahkan mantan pasukan anggota PETA dan Heiho untuk bergabung dalam BKR dengan tujuan mengamankan situasi ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung. Tujuan pembentukan tentara oleh Presiden Soekarno adalah untuk memperkuat keamanan umum (Fattah, 2005:46). Setelah BKR, pada tanggal 5 Oktober 1945

dibentuklah pengganti BKR yaitu TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan tujuan dapat menjadi sebuah pertanda kepada pihak Jepang maupun Sekutu bahwa Indonesia membentuk tentara tidak untuk menghadapi musuh datang (baik menghadapi Sekutu maupun Jepang sekalipun), tetapi pembentukan tentara oleh pemerintah Indonesia adalah untuk kepentingan keamanan dalam negeri, yaitu keamanan rakyat. Setelah pembentukan TKR, dunia kemiliteran Indonesia berkembang seiring perkembangan kebutuhan militer bangsa Indonesia hingga terbentuknya Tentara Nasional Indonesia seperti yang ada pada sekarang ini.

**c. Manfaat Kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta pendidikan.**

Pada bidang sosial ekonomi terdapat kebijakan Jepang yang menciptakan suatu hubungan dan menghasilkan keuntungan bagi bangsa Indonesia, walaupun di sisi lain terdapat kesengsaraan, penderitaan, dan kesenjangan yang dirasakan rakyat Indonesia dalam kebijakan *romusha* bentukan Jepang. Untuk dapat menciptakan pengontrolan (pengendalian) dan mobilisasi secara mendalam ke wilayah pedesaan Indonesia, Jepang membentuk Tonari Gumi. Tonari Gumi sendiri memiliki konsep yang sekarang ini disebut sebagai Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang terdiri sekitar 10 hingga 20 Kepala Keluarga. Tonari Gumi bertugas sebagai distributor bahan pangan dari desa untuk diserahkan kepada pemerintah Jepang, dalam program ini dicantumkan terkait penyerahan padi dan pengumpulan biji tanaman jarak (Kutoyo, 1997:309).

Perbedaan antara Tonari Gumi (RT/RW) masa pendudukan Jepang dengan Tonari Gumi (RT/RW) masa kini terletak pada fungsinya, dimana pada masa Jepang istilah RT dan RW digunakan untuk media penyaluran bahan-bahan pangan dan bahan kebutuhan lainnya untuk diserahkan kepada pemerintah Jepang, namun RT dan RW masa kini, salah satu fungsi RT dan RW adalah RT/ RW ikut membantu dalam proses administrasian kependudukan, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Pasal 15 tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan yaitu pada poin A mengenai pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.

Terdapat pula dampak positif dari kebijakan Jepang terhadap Indonesia dibidang pendidikan, dimana pemberlakuan penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa pengantar sehari-hari, penghapusan dualisme kurikulum, serta terdapat pendidikan dibidang militer yang berdampak pada ketrampilan militer pemuda Indonesia (Hudaidah & Karwana, 2022). Penggunaan bahasa Indonesia merupakan sebuah kebanggaan bangsa Indonesia dapat menggunakan bahasa kebangsaan yaitu bahasa Indonesia sesuai yang tertera pada ayat ketiga sumpah pemuda yang berbunyi “Kami Putra Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”. Oleh karena itu, hingga saat ini bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi pokok dalam sehari-hari dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi berbagai suku atau daerah yang saling memiliki bahasa yang berbeda.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti atau penulis menyimpulkan bahwa terkait sisi positif atau keuntungan yang dapat dipetik atau diperoleh bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang adalah terdapat pada bidang politik (pemerintahan dan birokrasi), bidang militer, bidang ekonomi, bidang sosial-budaya serta pendidikan. Pada dasarnya, sisi positif atau keuntungan yang dirasakan masyarakat Indonesia berdasarkan temuan peneliti bertujuan sebagai sumber belajar siswa agar mengetahui terkait apa saja yang ada pada sekarang merupakan inspirasi di masa lalu. Agar para siswa tidak hanya melihat sebuah penjajahan sebagai sesuatu hal yang negative atau buruknya saja, namun juga melihat bahwa dibalik penderitaan akibat penjajahan masih terdapat hikmah (sisi positif) yang diperoleh. Bentuk hikmah atau keuntungan dari kebijakan Jepang bagi Indonesia adalah Pertama, dibidang politik yaitu Dengan adanya organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang melibatkan rakyat Indonesia di dalamnya seperti Gerakan 3A, Putera, dan Jawa Hokokai secara tidak langsung memberikan pengetahuan baru terhadap rakyat Indonesia tentang sistem birokrasi. Hadirnya organisasi bentukan Jepang pada awalnya dibentuk untuk kebutuhan dan kepentingan Jepang namun di sisi lain juga berdampak pada rakyat Indonesia hingga sekarang, dimana masa kini banyak sekali partai-partai dan organisasi yang tumbuh di pemerintahan. pada struktur pembagian enam bidang pemerintahan oleh Jepang yang bertujuan mempermudah urusan administrasi dan lain-lain. Kedua, di bidang militer yaitu bekal kemiliteran yang diasah oleh para pemuda dapat membentuk suatu pertahanan untuk bangsa Indonesia ini sendiri. Seperti tentara yang ada pada masa kini, adalah berkat dari separuh didikan militer yang didapat pada masa Jepang di Indonesia. Dari BKR berkembang seiring perkembangan kebutuhan militer bangsa Indonesia hingga terbentuknya Tentara Nasional Indonesia seperti yang ada pada sekarang ini. Ketiga, di bidang sosial ekonomi, budaya dan pendidikan yaitu Untuk dapat menciptakan pengontrolan (pengendalian) dan mobilisasi secara mendalam ke wilayah pedesaan Indonesia, Jepang membentuk Tonari Gumi. Tonari Gumi sendiri memiliki konsep yang sekarang ini disebut sebagai Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Perbedaan antara Tonari Gumi (RT/RW) masa pendudukan Jepang dengan Tonari Gumi (RT/RW) masa kini terletak pada fungsinya, di masa kini memiliki fungsi untuk membantu dalam proses administrasian kependudukan. Keuntungan kebijakan Jepang terhadap Indonesia dibidang pendidikan, dimana pemberlakuan penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa pengantar sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aman. (2014). *Indonesia: Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Yogyakarta: Pujangga Press.
- Badrika, I. W. (1997). *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum*. Ed. 2, Cet. 2. Jakarta: Erlangga.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 189-205.

- Fattah, A. (2005). *Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer 1945- 2004*. Yogyakarta: LKiS.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hudaidah, H., & Karwana, M. A. P. (2022). Pendidikan Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Danadyaksa Historica*, 1(2), 97-104.
- Husaini, F dan Apid. (2008). *Romusa: Sejarah yang terlupakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Istifarah, A. (2014). *Kebijakan Pendudukan Pemerintahan Jepang Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Surabaya Tahun 1942-1945*.
- Koentjaraningrat. (1983). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kurasawa, A. (2015). *Kuasa jepang di Jawa (Perubahan Sosial di Perdesaan 1942-1945)*. Diterjemahkan oleh Hermawan Sulisty. Depok: Komunitas Bambu.
- Kutoyo, S. (1997). *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Praditya, D. W., & Sunarti, L. (2022). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Militer Jepang terhadap Kehidupan Sosial-Militer di Kedu-Syuu Tahun 1942-1945. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 4068-4077.